

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar isi	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penulisan	10
1.3.1. Tujuan Umum.....	10
1.3.2. Tujuan Khusus	10
1.4. Metode Penulisan	11
1.4.1. Tujuan Penulisan.....	11
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3. Sumber Data	12
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data	13
1.4.5. Analisa Data	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI, PARTAI POLITIK, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	
2.1. Konsep Korporasi.....	15
2.1.1. Teori Korporasi Dalam Hukum Pidana	15

2.1.2. Korporasi dalam Peraturan Perundang- Undangan Pidana Indonesia	21
2.2. Konsep Partai Politik	25
2.2.1. Teori Partai Politik	25
2.2.2. Partai Politik dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	28
2.3. Konsep tindak Pidana Korupsi	30
2.3.1. Teori Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana	30
2.3.2. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia	38
2.4. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang	41
2.4.1. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana.....	41
2.4.2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang Undangan Pidana di Indonesia	45

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Justifikasi Partai Politik sebagai Subjek Delik Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang	50
3.1.1 Justifikasi Filosofis Terhadap Partai Politik sebagai Korporasi	50
3.1.1 Justifikasi Yuridis Terhadap Partai Politik sebagai Korporasi	57
3.1.2 Justifikasi Politik Hukum Pidana terhadap Partai Politik sebagai Korporasi.....	67
3.2 Faktor-Faktor Penghambat Tidak dapat ditegakkannya Pemidanaan Korporasi Terhadap Partai Politik dalam tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	74

3.2.1 Analisis Faktor Yuridis Peraturan Perundang Undangan Pidana Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi	74
3.2.2 Analisis Faktor Praktek Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tentang Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Partai Politik Sebagai Korporasi	90
3.3 Konsep Pemidanaan Partai Politik Sebagai Korporasi ..	103
3.3.1 Tinjauan Konsep pemidanaan Partai politik sebagai korporasi Pada sistem hukum pidana negara amerika serikat	104
3.3.2 Tinjauan Konsep pemidanaan Partai politik sebagai korporasi Pada sistem hukum pidana negara Belanda	107
3.3.3 Rekonseptualisasi Subjek Delik Korporasi Khusus Bagi Badan Hukum Publik (Partai Politik) Sebagai Model Ideal Pemidanaan Korporasi Di Indonesia	112
 BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	116
4.2 Saran-saran.....	120